



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : POLITEKNIK NEGERI MALANG

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : UTAMI RETNO PUDJOWATI
2. Jabatan : KETUA PRODI D3 KONSTRUKSI JALAN, JEMBATAN DAN BANGUNAN AIR
3. NHK : 802133

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 153.115.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m<sup>2</sup>/148 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 27.930.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m<sup>2</sup>/200 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 44.425.000
3. Tanah Seluas 216 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.760.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 106.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG Tahun 1985, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU FEROZA Tahun 1994, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
3. MOBIL, DAIHATSU LUXIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. MOTOR, HONDA CBR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 4.806.135**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 267.921.135



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 267.921.135

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.